



Mandiri Atau Bergantung? Analisis Desentralisasi Fiskal dan Belanja Daerah di Kabupaten Kuningan

INFO PENULIS

Tatang Sukma Wijaya
Universitas Jenderal Soedirman
0.tatangsumawijaya@gmail.com
+6285872889503

Kikin Windhani
Universitas Jenderal Soedirman
kikin.windhani@unsoed.ac.id
+6281325613374

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wijaya, T. S., & Windhani, K. (2025). Mandiri Atau Bergantung? Analisis Desentralisasi Fiskal dan Belanja Daerah di Kabupaten Kuningan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5483-5493.

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah serta keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan belanja operasi di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 2004 – 2020. Penelitian menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan metode Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata DDF Kabupaten Kuningan sebesar 8,31 persen yang termasuk dalam kategori Sangat Kurang, sehingga mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan empiris menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, namun berpengaruh positif terhadap belanja operasi. Sementara itu, dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal maupun belanja operasi. Hasil penelitian ini menegaskan terkait ketergantungan fiskal Kabupaten Kuningan yang tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat serta menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kuningan

Abstract

The implementation of regional autonomy requires Local Governments to enhance fiscal independence in order to reduce reliance on transfer funds from the Central Government. This study examines the level of regional fiscal independence and the interrelationships among local own-source revenue, intergovernmental transfers, capital expenditure, and operational expenditure in Kuningan Regency during the period 2004 – 2020. The study employs secondary data analyzed using the Fiscal Decentralization Degree approach and Multiple Linear Regression analysis. The results indicate that the average Fiscal Decentralization Degree of Kuningan Regency is 8.31 percent, which falls into the Very Low category, reflecting a weak level of regional fiscal independence. Empirical findings reveal that local own-source revenue does not have a significant effect on capital expenditure but has a positive effect on operational expenditure. Meanwhile, intergovernmental transfers have a significant and positive effect on both capital expenditure and operational expenditure. These findings confirm the high fiscal dependence of Kuningan Regency on Central Government transfers and indicate that regional expenditure management remains predominantly oriented toward operational spending rather than capital investment.

Key Words: Regional Financial Independence, Local Own-Source Revenue, Kuningan

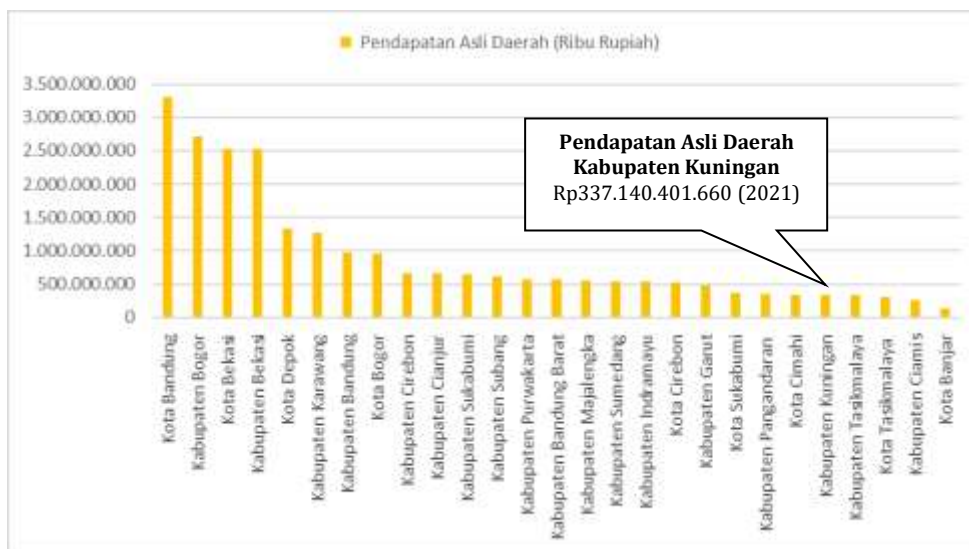
A. Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan seiring dengan penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan ini memberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih luas kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing (Khusaini, 2018). Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melmambessy (2022) menegaskan bahwa otonomi daerah mendorong pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam penyesuaian alokasi belanja daerah terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, implementasi otonomi daerah juga memunculkan tantangan baru, terkait dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan potensi ekonomi antar daerah di Indonesia. Ketimpangan potensi tersebut, menyebabkan tidak semua daerah mampu memanfaatkan kewenangan otonomi secara optimal, sehingga tujuan-tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai (Paksi, 2021).

Fenomena lain yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan ini tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah terhadap total pendapatan daerah. Kuncoro (2004) bahkan menyebutkan bahwa kondisi tersebut adalah fenomena yang ironis, mengingat pemerintah kabupaten/kota merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Ironi ini semakin terlihat dari tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota yang justru lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, yang ditandai oleh rendahnya PAD serta dominasi dana transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah (Hanafi, 2009).

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terindikasi mengalami tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini tercermin dari nilai PAD Kabupaten Kuningan yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Rendahnya PAD tersebut menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi relatif Kabupaten Kuningan, berikut adalah rekapitulasi PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menurut kabupaten/kota:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (2021)

Gambar 1. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Jawa Barat tahun 2021 (Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1, Kabupaten Kuningan berada pada posisi lima terbawah dalam realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2021, dengan nilai PAD sebesar Rp337.140.401.660. Lebih lanjut, apabila ditinjau dalam lingkup wilayah Bagian III Jawa Barat atau kawasan CIAYUMAJAKUNING (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan), Kabupaten Kuningan tercatat sebagai daerah dengan realisasi PAD terendah dibandingkan kabupaten/kota lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Kuningan relatif terbatas, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih tergolong tinggi.

Muryawan dan Sukarsa (2016) menyatakan bahwa PAD merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, di mana dalam mengukur hal tersebut, jumlah PAD, dana perimbangan, dan pinjaman merupakan kunci untuk menentukan apakah daerah yang bersangkutan sudah mandiri atau belum. Berdasar pada data yang dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Barat (2021), proporsi PAD Kabupaten Kuningan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2019 – 2021 lebih rendah, jika dibandingkan proporsi komponen lainnya dalam penerimaan daerah. Proporsi PAD Kabupaten Kuningan pada 2019 – 2021 hanya berkisar 10 – 12 persen, sedangkan proporsi dana perimbangan mencapai 59 – 67 persen. Pada dasarnya, tujuan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke daerah adalah untuk membantu pengoptimalan dalam proses penggalan potensi sumber pendapatan daerah melalui pembangunan fasilitas yang dibutuhkan (Kuncoro, 2004). Akan tetapi pada realisasinya, pembangunan yang pesat memicu ketergantungan fiskal yang tinggi pula antara daerah dan pusat. Windhani *et al.* (2019) berpendapat bahwa rendahnya PAD menyebabkan keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyokong kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal tersebut memicu semakin tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pusat.

Secara teoritis, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah dijelaskan melalui Hukum Wagner, di mana menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran dalam suatu perekonomian terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat (Kuncoro, 2004). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pendapatan per kapita masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Selain itu, studi empiris lain juga telah mengkaji DDF serta hubungan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Demora (2017), menemukan bahwa DDF, kemandirian fiskal, dan produktivitas belanja daerah Kota Jambi dalam kurun waktu 2001 – 2013 masih tergolong rendah, meskipun hubungan antar variabel menunjukkan pola yang positif. Sementara itu, Sutjipto *et al.* (2019) menyatakan bahwa DDF dan ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di 34 provinsi di Indonesia. Liu *et al.* (2016) juga menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah dan memiliki efek spasial yang signifikan antar wilayah. Hasil analisis *Spatial Durbin Model* menunjukkan bahwa keseimbangan antara desentralisasi pendapatan dan belanja

dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah, namun desentralisasi pendapatan yang tinggi di satu wilayah dapat berdampak negatif terhadap efisiensi wilayah sekitarnya.

Dengan demikian, adanya fenomena dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, di mana tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat tinggi, menunjukkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu dengan berdasar pada fenomena dan literatur terdahulu, menggunakan Data Sekunder dari Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 2004 – 2020 yang diolah dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Regresi Linier Berganda, penelitian ini dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada fokus pembahasan, di mana berfokus bukan hanya untuk melakukan identifikasi mengenai kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan Kabupaten Kuningan terhadap dana dari pusat. Namun juga, menyajikan analisis pengaruh dari variabel penerimaan terhadap pengeluaran daerah.

B. Metodologi

Metodologi mencakup Desain Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Metode Penelitian, Variabel Penelitian, serta Teknik Analisis Data. Penyusunan metodologi dilakukan secara sistematis agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta mampu menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif yang bersifat Kausal (*Explanatory Research*) dengan menggunakan Data Runtut Waktu (*Time Series*) dalam kurun waktu 2004 – 2020. Penelitian bertujuan untuk menganalisis DDF serta hubungan antar penerimaan dan pengeluaran daerah untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Kuningan.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Data Sekunder dalam kurun waktu 2004 – 2020, di mana mencakup data realisasi penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Kuningan. Data ini diperoleh dari lembaga-lembaga dan situs resmi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta situs dan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui Metode Dokumentasi serta Studi dan Survei Literatur, di mana data dikumpulkan dengan menelaah dan mencatat dokumen-dokumen resmi dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode Dokumentasi digunakan untuk memperoleh Data Sekunder, sedangkan Studi dan Survei Literatur dilakukan untuk mengkaji teori, konsep, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah.

4. Variabel Penelitian

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dinyatakan sebagai variabel independen, berupa realisasi anggaran PAD Kabupaten Kuningan dalam nilai Juta Rupiah dalam kurun waktu 2004 – 2020.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan atau Dana Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Wulandari & Iryanie, 2024). Dana Perimbangan dinyatakan sebagai variabel independen, berupa realisasi anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Kuningan dalam nilai Juta Rupiah dalam kurun waktu 2004 – 2020.

c) Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ini digunakan untuk menyokong penyediaan layanan publik dan pengembangan sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Belanja Modal dinyatakan sebagai variabel dependen, berupa realisasi anggaran Belanja Daerah yang tergolong Belanja Modal Kabupaten Kuningan dalam nilai Juta Rupiah dalam kurun waktu 2004 – 2020.

d) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi ini lebih menekankan bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional dari pemerintahan yang bersangkutan, di mana terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bunga, serta belanja subsidi (Rohima, 2019). Belanja Operasi dinyatakan sebagai variabel dependen, berupa realisasi anggaran Belanja Daerah yang tergolong Belanja Operasi Kabupaten Kuningan dalam nilai Juta Rupiah dalam kurun waktu 2004 – 2020.

5. Teknik Analisis Data

a) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF merupakan model analisis berupa rasio pengukuran dalam bentuk persentase yang digunakan untuk membandingkan nilai PAD terhadap total penerimaan daerah (Melmambessy, 2022). Adapun rasio DDF dapat dirumuskan:

$$DD_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:

DD_t = Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun t

PAD_t = Nilai realisasi PAD pada tahun t

TPD_t = Nilai realisasi total penerimaan daerah tahun t

Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Hanafi dan Mugroho (2009)

b) Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) dapat menunjukkan hasil analisis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$\begin{aligned} BM_t &= \beta_0 + \beta_1 PAD_t + \beta_2 DP_t + e \\ BO_t &= \beta_0 + \beta_1 PAD_t + \beta_2 DP_t + e \end{aligned}$$

Keterangan:

BM_t = Belanja Modal Kabupaten Kuningan pada Waktu (t) 2004 – 2020

BO_t = Belanja Operasi Kabupaten Kuningan pada Waktu (t) 2004 – 2020

β_0 = Intersep atau Titik Potong antar Garis Regresi

β_1 = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah

β_2 = Koefisien Regresi Dana Perimbangan

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan pada Waktu (t) 2004 – 2020

DP_t = Dana Perimbangan Kabupaten Kuningan pada Waktu (t) 2004 – 2020

e = Variabel Pengganggu

Dengan menggunakan E-Views, model regresi harus memiliki predikat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yang berarti bahwa lolos dari Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2012). Dalam penelitian, ditetapkan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a), dengan kriteria jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta jika $F_{tabel} \leq F_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hipotesis

$H_0 : \beta \leq 0$: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Operasi

$H_a : \beta > 0$: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Operasi

Uji t

Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2012). Dalam penelitian, ditetapkan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a), dengan kriteria jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta jika $t_{tabel} \leq t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hipotesis

$H_0 : \beta \leq 0$: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Operasi

$H_a : \beta > 0$: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Operasi

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi atau *R-Square* (R^2) berfungsi untuk menunjukkan kondisi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel bebas (Hanggara & Endang, 2018). Nilai Koefisien Determinasi adalah $0 < R^2 < 1$, di mana jika nilai R^2 kecil maka berarti kemampuan variabel bebas dalam memberikan kontribusi terhadap variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya.

C. Hasil dan Pembahasa

a. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah di Indonesia, sehingga Pemerintah Daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat (Kuncoro, 2004). Tingkat kemandirian fiskal dapat diukur menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD. DDF dihitung sebagai rasio antara PAD terhadap total penerimaan daerah, yang mencerminkan besaran dari kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai DDF, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Begitu sebaliknya, di mana semakin rendah nilai DDF, semakin besar pula tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, dengan menggunakan DDF sebagai indikator utama untuk menganalisis perkembangan kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Kuningan, di mana dirumuskan sebagai berikut:

$$DD_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Tabel 2. Rekapitulasi Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Kuningan tahun 2004 - 2020

t	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Keterangan
2004	5,95	Sangat Kurang
2005	7,03	Sangat Kurang
2006	5,60	Sangat Kurang
2007	5,67	Sangat Kurang
2008	5,08	Sangat Kurang
2009	6,71	Sangat Kurang

2010	6,11	Sangat Kurang
2011	6,36	Sangat Kurang
2012	6,63	Sangat Kurang
2013	6,92	Sangat Kurang
2014	10,68	Kurang
2015	9,66	Sangat Kurang
2016	10,43	Kurang
2017	14,69	Kurang
2018	11,99	Kurang
2019	10,97	Kurang
2020	10,76	Kurang
Rata-rata	8,31	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan (2025) (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kuningan berada pada kriteria “Sangat Kurang” dan “Kurang”, di mana rentang nilai persentase berkisar 00,00 – 20,00. Dalam tabel terlihat bahwa rata-rata dari DDF Kabupaten Kuningan pada periode 2004 – 2020 sebesar 8,31 persen. Nilai DDF Kabupaten Kuningan yang secara rata-rata berada pada kategori “Sangat Kurang” serta rendahnya proporsi PAD dan tingginya proporsi dana perimbangan dalam realisasi penerimaan daerah pada tahun 2004 – 2020, menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kuningan berada pada posisi rendah atau dengan kata lain “Kurang Mandiri”. Hal ini berarti membuktikan, Kabupaten Kuningan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Penerimaan Daerah terhadap Pengeluaran Daerah

Berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik, model regresi dalam penelitian dinyatakan telah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan metode *Jarque-Bera*, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,879782 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Selain itu, hasil uji lain meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi menunjukkan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi dasar dari regresi linier klasik. Dengan demikian, model regresi yang digunakan bersifat linier, tidak bias, serta menghasilkan estimasi parameter yang efisien dan konsisten, sehingga layak digunakan untuk menganalisis pengaruh penerimaan daerah terhadap Belanja Modal.

Estimasi Model Regresi

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan Belanja Modal

Variabel	Coefficient
C	- 61717,71
PAD	- 0,258048
DP	0,274280

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2025

Model Regresi:

$$\widehat{BM}_t = -61717,71 - 0,258048 PAD_t + 0,274280 DP_t + e$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi, nilai R^2 pada persamaan Belanja Modal (BM) sebesar 0,722231. Nilai tersebut berarti bahwa variasi variabel PAD dan dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 72,223 persen terhadap variabel Belanja Modal (BM), sedangkan 27,777 persen diberikan oleh variabel lain yang tidak ditetapkan dalam persamaan ini.

Uji Hipotesis

1) Uji F

Uji F dilakukan dengan membuat hipotesis berupa H_0 dan H_a yang dapat diterima atau ditolak, di mana dengan kriteria jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu sebaliknya. Adapun berdasarkan hasil olah data, nilai F-hitung pada Persamaan Belanja Modal (BM) sebesar 21,80086 sedangkan nilai F-tabel sebesar 3,739. Hal tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti PAD dan DP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap BM.

2) Uji t

Uji t dilakukan dengan membuat hipotesis berupa H_0 dan H_a yang dapat diterima atau ditolak, di mana dengan kriteria, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu sebaliknya. Berikut merupakan hasil Uji t pada persamaan Belanja Modal (BM):

Tabel 4. Uji t ($\alpha = 0,025$) pada Persamaan Belanja Modal (BM)

Variabel	t-hitung	t-tabel	p-value	Keterangan
PAD	-0,562303	2,14479	0,5828	Tidak Signifikan
DP	2,425644	2,14479	0,0294	Signifikan

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2025

Hipotesis 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta \leq 0$: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

$H_a : \beta > 0$: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Merujuk pada Tabel 4 dan berdasar pada hipotesis yang telah ditetapkan terhadap Belanja Modal, nilai t-hitung dari variabel PAD sebesar -0,562303, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,14479 atau -2,14479. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk negatif, di mana saat kondisi tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

Hipotesis 2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta \leq 0$: Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

$H_a : \beta > 0$: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Merujuk pada Tabel 4 dan berdasar pada hipotesis yang telah ditetapkan terhadap Belanja Modal, nilai t-hitung dari variabel DP sebesar 2,425644, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,14479. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, di mana saat kondisi tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti DP berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

Belanja Operasi

Berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik, model regresi dalam penelitian dinyatakan telah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan metode *Jarque-Bera*, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,735586 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Selain itu, hasil uji lain meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi menunjukkan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi dasar dari regresi linier klasik. Dengan demikian, model regresi yang digunakan bersifat linier, tidak bias, serta menghasilkan estimasi parameter yang efisien dan konsisten, sehingga layak digunakan untuk menganalisis pengaruh penerimaan daerah terhadap Belanja Operasi.

Estimasi Model Regresi

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan Belanja Operasi

Variabel	Coefficient
C	- 42850,05
PAD	0,004784
DP	1,157857

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2025

Model Regresi:

$$BO_t = -42850,05 + 0,004784 PAD_t + 1,157857 DP_t + e$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi, nilai R^2 pada persamaan Belanja Operasi (BO) sebesar 0,976328. Nilai tersebut berarti bahwa variasi variabel PAD dan dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 97,632 persen terhadap variabel Belanja Operasi (BO), sedangkan 2,368 persen diberikan oleh variabel lain yang tidak ditetapkan dalam persamaan ini.

Uji Hipotesis

1) Uji F

Uji F dilakukan dengan membuat hipotesis berupa H_0 dan H_a yang dapat diterima atau ditolak, di mana dengan kriteria jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu sebaliknya. Adapun berdasarkan hasil olah data, nilai F-hitung pada Persamaan Belanja Operasi (BO) sebesar 330,9591 sedangkan nilai F-tabel sebesar 3,739. Hal tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti PAD dan DP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap BO.

2) Uji t

Uji t dilakukan dengan membuat hipotesis berupa H_0 dan H_a yang dapat diterima atau ditolak, di mana dengan kriteria, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu sebaliknya. Berikut merupakan hasil Uji t pada persamaan Belanja Operasi (BO):

Tabel 6. Uji t ($\alpha = 0,025$) pada Persamaan Belanja Operasi (BO)

Variabel	t-hitung	t-tabel	p-value	Keterangan
PAD	0,007504	2,14479	0,9941	Tidak Signifikan
DP	7,371758	2,14479	0,0000	Signifikan

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2025

Hipotesis 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Operasi

$H_0 : \beta \leq 0$: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi

$H_a : \beta > 0$: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi

Merujuk pada Tabel 6 dan berdasar pada hipotesis yang telah ditetapkan terhadap Belanja Operasi, nilai t-hitung dari variabel PAD sebesar 0,007504, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,14479. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, di mana dalam hasil tersebut PAD berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap BO.

Hipotesis 4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Operasi

$H_0 : \beta \leq 0$: Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi

$H_a : \beta > 0$: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi

Merujuk pada Tabel 6 dan berdasar pada hipotesis yang telah ditetapkan terhadap Belanja Operasi, nilai t-hitung dari variabel DP sebesar 7,371758, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,14479. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, di mana saat kondisi tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti DP berpengaruh positif dan signifikan terhadap BO.

Pembahasan

Berdasar pada Hukum Wagner dengan jelas disebutkan, pengeluaran pemerintah bersumber dari penerimaan yang diperoleh (Kuncoro, 2004). Semakin tinggi penerimaan yang diperoleh, maka semakin menjamin terpenuhinya pengeluaran yang hendak dilakukan, begitu sebaliknya. Adapun sesuai dengan hal itu, asumsi dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, di mana

peningkatan pada sisi pendapatan, akan direspon dengan peningkatan sisi belanja dari daerah tersebut.

Namun berdasar pada hasil olah data, menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang berpengaruh dalam belanja modal dan operasi Kabupaten Kuningan, dikarenakan nilai dana perimbangan pada setiap tahun paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun dari sisi pengaruh variabel PAD terhadap belanja modal dan operasi, kesimpulan yang diperoleh menolak hipotesis yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena nilai PAD Kabupaten Kuningan memiliki proporsi yang paling rendah, sehingga PAD belum mampu berkontribusi secara penuh terhadap belanja modal dan operasi. Selain itu, pengaruh PAD yang tidak signifikan dan negatif menandakan bahwa nilainya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan besarnya belanja modal dan operasi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penerimaan pada komponen PAD Kabupaten Kuningan yang belum mencapai target pada periode-periode tertentu. Hasil analisis yang bertentangan ini juga ditandai dengan peningkatan pada sisi PAD, namun tidak direspon dengan peningkatan pada sisi belanja daerah, begitu sebaliknya.

Dengan demikian sesuai pembahasan di atas yang menyatakan nilai DDF Kabupaten Kuningan "Sangat Kurang" atau "Kurang Mandiri", di mana tercermin dari proporsi PAD yang rendah dan dana perimbangan yang tinggi, disertai dengan pembuktian-pembuktian yang linier, menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan komponen penting yang berpengaruh ke dalam belanja modal dan operasi Kabupaten Kuningan. Di samping itu, hal tersebut juga semakin menguatkan bahwa Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 17 tahun, yaitu 2004 – 2020 memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan atau dana transfer dari pusat.

D. Kesimpulan

Berdasar pada hasil olah data dan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian menyimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Kuningan selama periode 2004 – 2020 secara rata-rata berada pada kategori "Sangat Kurang" dengan nilai 8,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kuningan masih tergolong rendah dan struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu sesuai dengan hasil dari analisis regresi, menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap Belanja Modal, namun berpengaruh positif terhadap Belanja Operasi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal maupun Belanja Operasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan belanja daerah, terutama belanja yang bersifat produktif, masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu melakukan upaya yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan dapat memperbesar proporsi kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat dapat dikurangi. Secara lebih spesifik, pengelolaan komponen lain-lain PAD yang sah perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal agar mampu memberikan kontribusi yang stabil dan berkelanjutan dalam menunjang pembiayaan belanja daerah, terutama belanja yang mendukung pembangunan jangka panjang.

E. Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. (2022). *Statistik daerah Kabupaten Kuningan 2022*. BPS Kabupaten Kuningan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). *Statistik keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2021*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Demora, V. (2017). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13–20. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.3952>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hanafi, I., & Mugroho, T. L. (2009). *Kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. UB Press.

- Hanggara, A., & Darsih, E. (2018). *Dasar statistika manual & SPSS*. Mujahid Press.
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud, A. (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 485–492.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. UB Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Erlangga.
- Lisa, Y., & Priyagus, P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 162–170. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i2.2123>
- Liu, J., Hu, X., & Tang, H. (2016). Fiscal decentralization and regional financial efficiency: An empirical analysis of Spatial Durbin Model. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2016, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2016/6597138>
- Mangkoesoebroto, G. (1998). *Ekonomi publik*. BPFPE.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari rasio kemandirian daerah, ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal, dan efektivitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal, fiscal stress, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2), 229–252. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/9379>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Paksi, R. P. (2021). Determinants of economic growth: Case of Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 157–171. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.3.157-171>
- Rohima, S. (2019). *Ekonomi publik*. BPFPE.
- Santoso, R. P. (2003). Analisis pinjaman sebagai potensi pembiayaan pembangunan daerah: Studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 147–158.
- Sendow, J. E., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 17–27.
- Styawan, H. A. (2021). Analisis pengaruh belanja modal dan belanja operasional terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2004–2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2), 13–26.
- Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). Analisis desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 104–117. <https://doi.org/10.35837/subs.v3i2.609>
- Vanomy, A. E. (2019). Analisis hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan melalui belanja langsung terhadap produk domestik regional bruto. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 2(1), 62–73.
- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh investasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447–453. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.946>
- Winarno, S. (2015). *Panduan praktis penulisan karya ilmiah*. PT Kompas Media Nusantara.
- Windhani, K., Sambodo, H., & Handoyono, F. (2019). Kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, 242–258.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2024). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. *Jurnal Patriot*, 6(2). CV Budi Utama.